

# EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA

Sultan Yanuar Syawarudin<sup>1</sup>, Achluddin Rochim<sup>2</sup>, Bagoes Sunardjonto

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[sultanyanuar2000@gmail.com](mailto:sultanyanuar2000@gmail.com)

[didin@untag-sby.ac.id](mailto:didin@untag-sby.ac.id)

[bagoes97.bb@gmail.com](mailto:bagoes97.bb@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian dilaksanakan Dinas Sosial Kota Surabaya dalam penelitian ini mengemukakan kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Informan peneliti bidang rehabilitasi pekerja sosial, anak jalanan. Hasil penelitian Dinas Sosial Kota Surabaya sudah menjalankan tanggung jawab tujuan visi misi dengan menggunakan lima indikator dan faktor yang mempengaruhi kinerja.

Kata Kunci: Indikator Kinerja, Faktor-Faktor Mempengaruhi Kinerja

## ABSTRACT

*The research was carried out by the Surabaya City Social Service in this study to highlight the performance of the Social Service in fostering street children. The study used primary data and secondary data. Research informants in the field of rehabilitation of social workers, street children. The results of the research of the Surabaya City Social Service have carried out the responsibility for the vision and mission objectives by using five indicators and factors that affect performance.*

*Keywords: Performance Indicators, Factors Affecting Performance*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk sangat banyak sehingga memerlukan peningkatan kesejahteraan penduduknya. dengan pembangunan nasional usaha meningkatkan kualitas Indonesia secara berkelanjutan seluruh kehidupan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta memperhatikan pengembangan global.

Berdasarkan pasal 34 UUD 1945 anak terlantar dan orang miskin akan di asuh negara, artinya pemerintah akan bertanggung jawab mengasuh anak jalanan. Maka keluarlah kebijakan pemerintah dalam program

kesejahteraan anak jalanan. Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) masih kurang optimal dengan berbagai permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam kasus anak jalanan.

Dalam hal ini Pemkot Kota Surabaya membuat peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang penanggulangan perlindungan, tidak hanya menjelaskan prosedur juga untuk mengurangi perilaku anak jalanan tetapi juga pemerintah kota juga akan memberikan pembinaan anak jalanan untuk mengubah perilaku agar tidak turun kejalanan, juga memberikan penertiban dan keamanan perkotaan. Untuk itu, Dinas Sosial mencanangkan program rehabilitasi anak jalanan yang diawasi oleh Satpol PP, Limnas

dan posko-posko lainnya yang ada di Kota Surabaya 24 jam.

Sektor PMKS cukup baik dalam menjalankan tanggung jawabnya yang merupakan faktor pendukung sektor PMKS dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kaidah administrasi. Baksos di UPTD menjalankan akuntabilitasnya dengan cukup baik. Akuntabilitas kepada masyarakat berupa imbauan untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan, sehingga diharapkan muncul partisipasi dari masyarakat. Tingginya angka anak jalanan di Kota Surabaya menunjukkan perlunya peningkatan kinerja Divisi Masalah Kesejahteraan, dalam hal ini kewenangan menangani permasalahan anak jalanan. Kinerja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pelayanan sosial di UPTD Kota Surabaya dalam penanganan anak jalanan di Kota Surabaya sangat penting dalam menunjang keberhasilan kesejahteraan sosial di masyarakat khususnya di Kota Surabaya.

Pembinaan anak jalanan yang dilakukan pemerintah kota surabaya kepedulian terhadap anak jalanan di masa depannya. Di Pondok Sosial Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Surabaya, pemkot membina anak putus sekolah hingga anak dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat, anak-anak yang tinggal di kampung anak negeri memiliki berbagai latar belakang. Mereka dari putus sekolah, anak jalanan hasil penertiban razia Satpop PP di jalanan anak yang terkena razia akan di data UPTD jika masih mempunyai keluarga akan di kembalikan kekeluarga sementara tidak mempunyai keluarga akan dibina di Kampung Anak Negeri. Prosedur pembinaan menerapkan dua jenis dengan pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal dengan bersekolah jika mengalami putus sekolah akan di ikutkan kerjar paket, sedangkan pembinaan non formal akan diberikan kegiatan wirausaha contoh melakukan pencucian motor, pembeutan makanan, memperbaiki HP, dan mengelola berbagai minuman khas Indonesia setiap produk dijual ke hotel dan kantor. Jadi adanya pembinaan dalam wirausaha dapat menambah uang saku dari hasil wirausaha.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis peneliiian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan ini penulis akan mendapatkan kemudahan dalam menghasilkan data sehingga bisa mengevaluasi kinerja Dinas Sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga yaitu observasi, untuk melakukan observasi mengamati langsung kelapangan. Wawancara, merupakan data pendukungnya pelaksanaan penelitian. Dokumentasi, untuk memperoleh data dari dokumentasi Dinas Sosial seperti rekam anak jalanan dan sosialisasi dinas sosial kepada masyarakat. Teknik analisis data menggunakan tiga dalam penelitian kualitatif : 1. Reduksi data, data yang didapat dilapangan kemudian dirangkum dn mefokuskan pada hal-hal penting agar memberikan gambaran yang jelas. 2. Penyajian data, mengumpulkan informasi yang akan ditarik kesimpulan berbentuk penyajian data berupa teks naratif, bagan, grafik, jaringan, matrik. 3. Penarik kesimpulan, hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan akhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kualitas pelayanan pegawai Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan Peraturan Kota Surabaya sudah memahami dan menjalankan sesuai tugasnya . Untuk program Dinas Sosial dengan menggandeng Lembaga-Lembaga yang menyangkut pembinaan anak jalanan sehingga bisa berjalan dengan baik . Dalam pembinaan bimbingan mental dan spiritual Dinas Sosial membentuk sikap dan perilaku yang memberikan hal positif kepada masyarakat .

Visi, misi dan tujuan dinas sosial sudah berjalan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dalam masalah pembinaan anak jalanan dan kesejahteraan sosial kota Surabaya dengan semua program yang dijalankan. Dalam memberikan tugas dan tanggung jawabnya Dinas Sosial sudah menjalankan tugas dalam pembinaan anak jalanan kota Surabaya. Namun kendala pertama terbatasnya SDM yang ada

seperti kurangnya jumlah pegawai dengan itu Dinas Sosial kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial, kedua anggaran seperti anak jalanan dengan tingkat yang tinggi tidak bisa diprediksi berapa banyak yang akan kita tampung contohnya pihak dinas sosial sudah siap dengan melaporkan anggaran yang dibutuhkan dalam memfasilitasi semua program kegiatan tetapi dalam hal tersebut bisa saja ada tambahan data masuk anak jalanan jadi mempengaruhi anggaran yang masuk kedalam Dinas Sosial kota Surabaya solusi dari masalah anggaran tersebut data akan diperbarui sesuai dengan data anak jalanan sehingga bisa menjadi optimal, ketiga obyek sasaran dari kendala masih tertutupnya pengakuan anak jalanan tetapi dari pihak Dinas Sosial bisa melihat dari aktivitas anak jalanan jadi dari situ kita bisa mengoptimalkan tugas dari Dinas Sosial.

Dinas Sosial Surabaya berupaya mesinkronkan apa yang di kerjakan dengan visi misi Kota Surabaya tidak cuma anak jalanan, lingkungan masyarakat jugadiperhatikan oleh Dinas Sosial. Permasalahan yang lainnya seperti mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga bisa berkembang program pembinaan anak jalanan dan memberikan kenyamanan masyarakat dalam permasalahan anak jalanan. Hal ini dapat dilihat pada hasil observasi menyatakan bahwa ada sinkronisasi kebijakan layanan Dinas Sosial kepada masyarakat dengan visi dan misi kota surabaya.

Dinas sosial masih terbatasnya SDM dalam tanya pembinaan anak jalanan sehingga belum bisa jadi berkualitas dalam menjalankan tugas tetapi tidak putus dari situ dinas sosial berkerja sama dengan lembaga yang terpaut dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan masalah pembinaan anak jalanan sehingga bisa dikatakan meskipun Dinas Sosial tidak memiliki SDM yang berkualitas tetapi dinas sosial tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai aturan dari peraturan kota Surabaya dalam pembinaan anak jalanan. Bahwa masih minimnya kualitas SDM di Dinas Sosial kota Surabaya dari permasalahan itu dinas sosial tidak menyerah, solusi dengan permasalahan tersebut dinas sosial berkerja sama dengan lembaga

terkait kesejahteraan sosial seperti TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Satpol PP disetiap posko-posko di surabaya sehingga tugas tanggung jawab mengenai program akan berjalan dengan baik dengan kerjasama oleh pihak lembaga-lembaga.

Permasalahan dalam Dinas Sosial adalah faktor minim jumlah pegawai tetapi dalam permasalahan tersebut jika ditanya skill yang terdapat dalam Dinas Sosial dan pekerja sosial bisa dibidang mempunyai skill yang bagus dan dalam permasalahan Dinas Sosial bekerjasama dengan lembaga sosial dengan memiliki keahlian dalam pembinaan anak jalanan.

Lembaga atau stackholder dalam memberikan bantuan dalam permasalahan pembinaan anak jalanan Kota Surabaya guna lembaga tersebut mempunyai kapasitas diri, memberikan pemilihan lembaga relawan sosial akan di lombakan dalam tingkat kota bahkan sampai tingkat nasional dengan memfasilitasi untuk mendapatkan program anak jalanan. Aspek motivasi juga dapat dilihat dari internal dengan lembaga atau stackholder kimerja dalam pemberian layanan. Terkait dengan peran dan tanggung jawab dinas sosial dan lembaga sosial sehingga layanan program pembinaan anak jalanan cukup baik.

Terkait dengan Proyek Pengembangan Anak Jalanan. Sebaran anak jalanan sangat tinggi setiap wilayah, tujuan program tersebut adalah untuk memberikan rasa ketertiban dan keamanan di tempat-tempat umum. Selalu berusaha agar pekerjaan Dinas sosial selaras dengan tujuan dan tugas Pemerintah Kota Surabaya itu sendiri. Bukan hanya anak jalanan, tapi masalah sosial lainnya, seperti berusaha mengurangi kesenjangan sosial.

Pada lingkungan masyarakat Dinas Sosial masih mempunyai kendala sebagian masyarakat masih tidak paham nilai larangan dalam membikan uang kepada anak jalanan. Hal ini dibentuk hasrat seorang untuk membantu sesama namun yang akan menimbulkan permasalahan tidak dipungkiri anak jalanan akan kembali keesokan harinya untuk turun kejalan. Dinas

Sosial berusaha memberikan masyarakat sosialisasi atas program anak jalanan agar tidak memberikan uang kea anak jalanan. lingkungan keluarga juga bisa mempengaruhi seperti masalah ekonomi jadi anak akan jadi korban turun ke jalan untuk minta-minta.

## KESIMPULAN

Dinas Sosial kota Surabaya dengan menggandeng stakeholder dan bekerjasama dengan para instansi-instansi keahlian keterampilan dapat dinilai dari beberapa hal yang menyatakan bahwa kualitas layanan dilihat dari staf melayani pembinaan anak jalanan sesuai peraturan SOP Dinas Sosial. Visi, misi dan tujuan dinas sosial sudah berjalan dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dalam masalah pembinaan anak jalanan dan kesejahteraan sosial kota Surabaya dengan semua program yang dijalankan. Dinas Sosial cukup baik dalam menjalankan tanggung jawab jadi pelaksanaan program ini sudah baik dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam pembinaan anak jalanan.

Dinas Sosial sudah cukup baik dan dengan bekerja sama dengan lembaga atau stakeholder dengan keahlian yang mengatasi permasalahan dalam anak jalanan. Aspek motivasi juga dapat dilihat dari internal dengan lembaga atau stakeholder kinerjanya dalam pemberian layanan ini. Terkait dengan peran dan tanggung jawab dinas sosial dan lembaga stakeholder itu sendiri sehingga layanan program pembinaan anak jalanan cukup baik. Dalam lingkungan kerja kurang optimal karna kuarangnya SDM yang berkualitas di kantor dinas dan untuk di lingkungan masyarakat masih adanya yang kurang paham tentang program pembinaan anak jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifani, Sari, & Rifkah. Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.* 8, 147–155 (2018).

Suyitno. Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *J. Chem. Inf. Model.* 53, 107–118 (2013).

Suhardi, Suprojo, & Bagus,. Peran Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pembinaan Anak Jalanan. *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Univ. Tribhuwana Tungadewi* 2, 42408 (2013).

Aditama, & Widowati. Analisis Kinerja Organisasi. *J. Public Policy Manag. Rev.* 6, 283–295 (2017).

Novembri, Upaya Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Surabaya. *Kaji. Moral dan Kewarganegaraan* 5, 492–506 (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak